



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

SISTERHOOD DIPLOMACY SEBAGAI MODEL SISTER CITY: PERAN KOMUNITAS PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANYUMAS DAN ALAPPUZHA

Dias P.S. Mahayasa^{1*}, Angela C. Depari¹, Kholifatut Saadah¹, Arum T. Utami¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

***Corresponding Author: dias.pabyantara@unsoed.ac.id**

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di kota-kota Global South banyak digerakkan oleh komunitas perempuan. Di Banyumas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mayoritas perempuan berperan dalam pemilahan dan bank sampah. Di Alappuzha, India, Kudumbashree dan Haritha Karma Sena (HKS) menjadi penggerak pengumpulan sampah kering oleh masyarakat. Walaupun penting, peran mereka sering berada dalam posisi rentan, relasi kerja informal, upah rendah, dan perlindungan kerja terbatas. Kondisi ini mencerminkan *feminisation of precarity*, ketika partisipasi perempuan dianggap sebagai ukuran pemberdayaan, tetapi realitasnya masih penuh kerentanan. Tulisan ini menggunakan kerangka konsep feminist sisterhood diplomacy untuk menekankan pentingnya kerja sama antar kota yang berpusat pada solidaritas kelompok perempuan. Dengan pendekatan deskriptif-komparatif, artikel ini menjelaskan potensi kolaborasi antara KSM Banyumas dan Kudumbashree Alappuzha. Bentuk kerja sama meliputi pertukaran pengetahuan, pelatihan bersama, advokasi kebijakan, dan penguatan jaringan lintas kota. Artikel ini menegaskan bahwa kualitas pengelolaan sampah di level kota bergantung pada pengakuan dan penguatan kerja perempuan sebagai penggerak utama sistem, dan penting dilakukan kerjasama internasional dalam aspek ini.

Kata kunci: Banyumas, Alappuzha, Pengelolaan Sampah, Pekerja, Perempuan

ABSTRACT

Waste management in Global South cities is primarily driven by women's communities. In Banyumas, community-based groups (Kelompok Swadaya Masyarakat), which predominantly consist of women, play a central role in waste sorting and waste banks. In Alappuzha, India, Kudumbashree and the Haritha Karma Sena (HKS) lead household-level waste collection efforts. Despite their importance, these women's roles often remain vulnerable, marked by informal labor relations, low wages, and limited workplace protections. This reflects a feminization of precarity, where women's participation is celebrated as a measure of empowerment, yet in reality, it is embedded in persistent insecurity. This article employs a feminist political economy framework, with the concept of feminist sisterhood diplomacy, to highlight the importance of city-to-city cooperation grounded in women's solidarity. Using a descriptive-comparative approach, it examines the potential collaboration between Banyumas's KSM and Alappuzha's Kudumbashree. Possible forms of cooperation include knowledge exchange, joint training, policy advocacy, and



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

strengthening cross-city networks. The article argues that the quality of urban waste management systems depends on recognizing and strengthening women's labor as the backbone of the system, and that international collaboration in this field is crucial.

Keywords: Banyumas, Alappuzha, Waste Management, Labor, Women

PENDAHULUAN

Isu pengelolaan sampah di negara-negara Global South masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia (2018) memperkirakan timbunan sampah global meningkat dari 2,01 miliar ton pada 2016 menjadi 3,4 miliar ton pada 2050, dengan kontribusi terbesar berasal dari negara-negara berkembang di Asia. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya pendanaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga model pengelolaan sampah terpusat sering kali tidak efektif (Guerrero, Maas, dan Hogland, 2013; Wilson, Velis, dan Cheeseman, 2012).

Sebagai alternatif, pendekatan desentralisasi melalui sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas semakin mendapat perhatian. Model ini telah diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Banyumas (Indonesia) melalui penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta di Alappuzha (India) melalui program komposting rumah tangga yang diperkuat oleh jaringan perempuan Kudumbashree (Sembiring dan Nitivattananon, 2010; Suryani, Latifah, dan Agustina, 2021; Mohan, Nithya, dan Anitha, 2020). Studi-studi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan inovasi lokal sangat bergantung pada partisipasi aktif komunitas.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa komunitas perempuan merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah. Di Banyumas, KSM menjadi motor penggerak operasional TPST, sedangkan di Alappuzha jaringan Kudumbashree berhasil membangun model pengomposan yang efektif. Namun, meskipun kontribusi mereka sangat vital, posisi perempuan dalam sistem pengelolaan sampah masih bersifat rentan, ditandai dengan upah yang minim, perlindungan sosial yang terbatas, serta kurangnya pengakuan formal baik di tingkat sosial maupun politik (Purwendah dan Wahyono, 2022; Yandria, Budia, dan Putri, 2023).

Seiring berkembangnya diplomasi kota (*city diplomacy*) dalam studi hubungan internasional, terdapat peluang bagi kota-kota di Global South untuk memperkuat kapasitas tata kelola lingkungan melalui kerja sama lintas batas. Kajian mengenai diplomasi kota Jakarta di sektor lingkungan menunjukkan bahwa jejaring antar kota berpotensi mendukung inovasi lokal, meskipun sebagian besar kerja sama yang ada masih bersifat simbolik (Hidayat dan Pusparini, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas di Banyumas dan Alappuzha, dengan fokus pada peran komunitas perempuan sebagai aktor utama. Selain itu, penelitian ini menyoroti potensi kerja sama antar kota dalam memperkuat keberlanjutan sistem pengelolaan sampah dan memperbaiki posisi sosial-ekonomi komunitas perempuan di kedua wilayah.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi komparatif untuk menganalisis praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas di Banyumas (Indonesia) dan Alappuzha (India). Pemilihan kedua kasus didasarkan pada kesamaan konteks sebagai kota di Global South yang menghadapi krisis pengelolaan sampah namun mampu mengembangkan inovasi berbasis komunitas dengan keterlibatan perempuan sebagai aktor utama.

Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan di Banyumas (KSM dan Dinas Lingkungan Hidup), wawancara mendalam dengan aktivis dan peneliti di Alappuzha yang terkait dengan Kudumbashree, serta analisis dokumen berupa kebijakan daerah, laporan organisasi masyarakat sipil, dan literatur sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis tematik dan dibandingkan secara lintas kasus (*cross-case analysis*) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta peluang kerja sama antar kota dalam memperkuat peran komunitas perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Pekerja Perempuan dalam Pengelolaan Sampah

Krisis pengelolaan sampah di negara-negara Global South telah menjadi salah satu tantangan besar abad ke-21. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang semakin cepat, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga telah mendorong lonjakan volume sampah yang melampaui kapasitas sistem pengelolaan formal. Dalam konteks ini, inovasi berbasis komunitas muncul sebagai solusi alternatif yang adaptif, seperti terlihat pada kasus Banyumas di Indonesia dan Alappuzha di Kerala, India. Kedua kota ini sering dipandang sebagai contoh sukses model desentralisasi (Purwendah & Wahyono, 2022; Mohan, Nithya, & Anitha, 2020). Namun, jika ditelaah lebih jauh, keberhasilan tersebut bertumpu pada kerja perempuan di tingkat komunitas yang justru menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi yang signifikan (Yandria, Budia, & Putri, 2023). Kondisi ini memperlihatkan fenomena feminisation of precarity, di mana perempuan menjadi aktor inti dalam menopang keberlanjutan sistem, namun tetap berada dalam posisi rentan, minim pengakuan, dan kurang dilindungi (Wilson, Velis, & Cheeseman, 2012).

Di Banyumas, perubahan pola pengelolaan sampah dipicu oleh krisis TPA Kaliore pada tahun 2018 (Ridlo, 2018). Ketidakmampuan TPA menampung volume sampah mendorong pemerintah daerah mencari alternatif melalui sistem desentralisasi. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kemudian dibentuk di tingkat desa atau kelurahan untuk mengelola sampah dari sumbernya. Mayoritas anggota KSM adalah perempuan, yang sehari-hari bertugas mengumpulkan, memilah, dan mengolah sampah. Pekerjaan mereka berkontribusi langsung pada berfungsinya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), yang menjadi tulang punggung ekosistem RDF (Refuse-Derived Fuel) di Banyumas. Namun, meskipun



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

peran ini esensial, kerja perempuan KSM sering tidak diakui dalam narasi kebijakan maupun media. Fokus utama pemerintah daerah dan investor lebih tertuju pada aspek teknologi, seperti pembangunan unit RDF dan pyrolysis, yang dianggap sebagai simbol modernitas dan solusi jangka panjang. Dengan demikian, kerja perempuan KSM cenderung invisibel, dipandang sebagai kontribusi sosial sukarela, dan tidak dihargai setara dengan kerja formal (Purwendah dan Wahyono, 2022; Sholihah dan Rahardjo, 2021).

Kondisi kerja perempuan KSM mencerminkan bentuk nyata *precarious labour*. Upah yang diterima jauh di bawah standar minimum kabupaten, sering kali tidak mencapai UMR, dan mereka tidak memiliki kontrak formal yang menjamin perlindungan kerja. Pekerjaan dilakukan dengan risiko kesehatan tinggi, mulai dari paparan limbah medis, bau menyengat, hingga ancaman kecelakaan akibat peralatan sederhana yang dipakai untuk memilah. Perlindungan sosial, baik berupa jaminan kesehatan maupun asuransi kecelakaan, hampir tidak tersedia. Dalam konteks inilah feminisation of precarity terlihat jelas, karena kerja perempuan dianggap sebagai perpanjangan tugas domestik yang “alami” tanpa pengakuan profesional, meskipun menopang keseluruhan sistem pengelolaan sampah Banyumas (Suryani, Latifah, dan Agustina, 2021).

Sementara itu, di Alappuzha, Kerala, latar belakang sejarahnya sedikit berbeda. Pada awal 2000-an, kota ini mengalami protes besar akibat pencemaran yang dihasilkan oleh TPA kota. Warga menolak keberadaan TPA dan menuntut perubahan sistem. Pemerintah daerah kemudian bekerja sama dengan komunitas untuk membangun model pengelolaan sampah desentralisasi, yang berbasis rumah tangga dan fasilitas kompos kecil (Choudhury, 2017). Kudumbashree Mission, sebuah program pemberdayaan perempuan berbasis *Self-Help Group* (SHG) yang telah beroperasi di Kerala sejak 1998, menjadi aktor kunci dalam proses ini. Melalui Haritha Karma Sena (HKS), Kudumbashree mengorganisir ribuan perempuan untuk melakukan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengelola unit pengolahan di tingkat komunitas (Mohan, Nithya, dan Anitha, 2020).

Keberadaan perempuan Kudumbashree di Alappuzha sangat terlihat di ruang publik. Mereka mengenakan seragam hijau, melakukan pengumpulan sampah secara rutin, dan menjadi wajah dari kampanye Malinya Mukta Keralam (Kerala Bebas Sampah). Bahkan dalam berbagai laporan media, Kudumbashree sering dijadikan contoh keberhasilan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan (Saravana dan Pushpa, 2017). Akan tetapi, keterlihatan ini tidak otomatis berarti peningkatan kesejahteraan. Upah anggota HKS berkisar antara ₹4.500 hingga ₹20.000 per bulan, yang masih jauh dari layak jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus mereka tanggung. Pekerjaan ini juga tidak dilengkapi dengan perlindungan sosial memadai, dan banyak dari mereka yang masih menghadapi stigma sosial karena dianggap “pekerja sampah” meskipun berkontribusi penting pada kesehatan kota (Tnn, 2025).



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Dengan demikian, Alappuzha menunjukkan pola berbeda dibandingkan Banyumas. Jika di Banyumas perempuan menghadapi invisibilitas dalam narasi formal, di Alappuzha mereka justru sangat terlihat, tetapi dalam kondisi terlihat namun rentan. Peran mereka dipublikasikan sebagai bentuk pemberdayaan namun pada kenyataannya Pemberdayaan tersebut lebih bersifat retorik karena tidak diikuti dengan perbaikan kondisi material maupun jaminan sosial yang memadai. Meskipun, Kudumbashree telah lama dipandang sebagai ikon pemberdayaan perempuan di Kerala, kondisi kerja Haritha Karma Sena tetap berada pada posisi rentan. Upah yang diterima jauh di bawah standar minimum, proteksi sosial terbatas, dan pekerjaan ini masih dipandang sebagai pekerjaan kelas bawah. Hal ini menunjukkan bahwa narasi pemberdayaan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, melainkan sering menjadi retorika yang menutupi kerentanan struktural (Rakendu S., 2025). Selain itu, sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses pada perlindungan sosial yang memadai, seperti jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan, ataupun jaminan hari tua. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berat tidak diimbangi dengan perlindungan atas risiko kesehatan dan keamanan kerja yang mereka hadapi (Saravana & Pushpa, 2017).

Sistem pengelolaan sampah desentralisasi di Global South secara umum menunjukkan ketergantungan yang kuat pada kerja perempuan. Baik di Banyumas maupun di Alappuzha, perempuan menjadi tulang punggung operasional dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Posisi ini sering dipandang sekadar sebagai bagian dari sektor informal sehingga kontribusinya kurang dihargai, ditandai dengan upah rendah, proteksi sosial yang terbatas, serta minimnya akses dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini juga ditegaskan dalam penelitian sebelumnya mengenai kerentanan pekerja perempuan dalam sistem desentralisasi pengelolaan sampah (Mohan, Nithya, & Anitha, 2020; Purwendah & Wahyono, 2022). Hal ini selaras dengan argumen Wilson, Velis, dan Cheeseman (2012) yang menyatakan bahwa sektor informal memainkan peran vital dalam pengelolaan sampah di negara berkembang, tetapi seringkali diabaikan oleh kebijakan formal.

Perbedaannya, di Banyumas perempuan menghadapi invisibilitas. Pekerjaan mereka tidak masuk dalam narasi kebijakan maupun diskursus teknologi. Mereka seakan-akan hanya menjadi operator di belakang layar, sementara keberhasilan sistem dipersonifikasikan dalam bentuk inovasi RDF dan pyrolysis. Di Alappuzha, perempuan Kudumbashree/HKS justru sangat terlihat, namun keterlihatan ini lebih bersifat simbolik ketimbang substansial. Peran mereka dipublikasikan untuk menunjukkan keberhasilan program pemerintah, tetapi tidak disertai peningkatan hak dan kesejahteraan. Dengan kata lain, Banyumas menghadapi masalah invisible labour, sedangkan Alappuzha menghadapi *visible but precarious labour*.

Implikasi Kebijakan dan Sosial

Analisis terhadap dinamika pengelolaan sampah di Banyumas dan Alappuzha menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap kontribusi perempuan. Jika kerja perempuan terus-menerus dianggap sebagai kontribusi sukarela tanpa



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

upah yang memadai, sistem berisiko tidak berkelanjutan karena bergantung pada kerja yang undervalued (Wilson, Velis, & Cheeseman, 2012; Sembiring & Nitivattananon, 2010). Integrasi perspektif gender dalam kebijakan lingkungan karenanya menjadi syarat mutlak. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak boleh diukur hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan, pengakuan, dan kesejahteraan bagi aktor perempuan di lapangan (Saravana & Pushpa, 2017; Mohan, Nithya, & Anitha, 2020).

Dalam konteks Banyumas, penting untuk memformalkan posisi KSM perempuan. KSM perlu diakui sebagai bagian dari sistem pengelolaan resmi, bukan sekadar mitra sukarela. Legalitas melalui Surat Keputusan Desa perlu diperkuat dengan kontrak kerja formal, skema upah minimum, serta akses ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan hasil FGD yang menunjukkan bahwa KSM saat ini beroperasi sebagai mitra binaan Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan sarana prasarana, tetapi belum memiliki jaminan kesejahteraan yang memadai (Rosiyani, E., 2025).

Sementara itu, dalam konteks Alappuzha, reformasi yang diperlukan adalah memastikan bahwa anggota Kudumbashree/HKS tidak hanya menjadi wajah kampanye Malinya Mukta Keralam, tetapi juga mendapat hak-hak yang sebanding. Skema perlindungan kesehatan, jaminan pensiun, serta kebijakan peningkatan upah menjadi mendesak karena saat ini peran perempuan masih dibingkai dalam retorika pemberdayaan tanpa perbaikan kondisi material (Mohan, Nithya, & Anitha, 2020; Saravana & Pushpa, 2017; Rakendu S., 2025).

Selain itu, penting pula melihat dimensi interseksionalitas. Perempuan yang bekerja dalam pengelolaan sampah di Banyumas maupun Alappuzha sebagian besar berasal dari kelompok kelas bawah. Mereka tidak hanya menghadapi diskriminasi berbasis gender, tetapi juga kerentanan ekonomi dan stigma sosial. Dalam hal ini, feminisation of precarity tidak hanya soal gender, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidakadilan kelas dan status sosial. Zhang (2020) menunjukkan bagaimana perempuan pekerja migran di Tiongkok menghadapi kerentanan ganda, yaitu eksklusi dari perlindungan formal sekaligus beban kerja lingkungan yang berat. Pola serupa juga terlihat di Banyumas dan Alappuzha, di mana perempuan yang paling miskin harus menanggung beban terbesar dari sistem pengelolaan sampah (Rosiyani, E., 2025; Rakendu S., 2025).

Feminist Sisterhood Diplomacy sebagai Alternatif Solusi

Menghadapi persoalan ini, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik. Feminist Sisterhood Diplomacy dapat menjadi kerangka alternatif dalam membangun kerjasama antar kota berbasis solidaritas perempuan lintas batas. Konsep Feminist Sisterhood Diplomacy hadir untuk membongkar ulang relasi lintas kota bukan semata sebagai kerja sama antar pemerintah daerah, tetapi sebagai diplomasi akar rumput berbasis solidaritas perempuan. Model ini mengusulkan bentuk diplomasi horizontal yaitu people-to-people diplomacy yang memungkinkan organisasi perempuan akar rumput dari



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

kota berbeda saling bertukar pengetahuan, membangun kapasitas kolektif, dan melakukan advokasi bersama atas dasar pengalaman kerja yang serupa. Beberapa contoh yang telah dilakukan seperti Gabriela Network di Filipina atau gerakan transnasional berbasis feminis digital di Amerika Latin menunjukkan bahwa solidaritas lintas batas antarperempuan mampu menghasilkan pengaruh politik dan perubahan kebijakan (Enrile & Levid, 2009; Diez Bossio et al., 2023). Dengan demikian, relasi sister city dapat diperluas menjadi wadah kerja sama antarkomunitas perempuan yang tidak hanya memperjuangkan isu-isu teknis dan pengembangan teknologi, tetapi juga keadilan gender dalam kerja dan keberlangsungan kota (Choi et al., 2023).

Pemikiran feminis dalam isu ekonomi politik mendiskusikan bagaimana sistem ekonomi modern bergantung pada bentuk-bentuk kerja yang tidak diakui dan tidak dibayar, terutama kerja-kerja perawatan (care work) yang banyak dilakukan oleh perempuan. Dalam konteks kota-kota Global South, seperti Banyumas di Indonesia dan Alappuzha di India, kerja perempuan di sektor pengelolaan sampah kerap dianggap sebagai aktivitas sukarela atau sekadar partisipasi komunitas. Padahal, kontribusi ini menjadi infrastruktur sosial yang menopang keberhasilan program lingkungan, dari pemilahan sampah hingga sistem desentralisasi. Pendekatan ini menolak dikotomi antara sektor produktif dan reproduktif, serta mendorong pengakuan atas kerja komunitas perempuan sebagai isu utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Natividad, 2011; Boris, 2020).

Feminist Sisterhood Diplomacy menempatkan komunitas perempuan dalam hal ini KSM di Banyumas dan Kudumbashree di Alappuzha Sebagai subjek utama dalam kerjasama sister city. Boris dan Vosko (2020) menekankan bahwa solidaritas feminis harus melampaui sekadar kesetaraan hukum formal dengan mengakui perbedaan pengalaman perempuan di dunia kerja. Dalam kerangka ini, kerjasama Banyumas dan Alappuzha bukan hanya soal pertukaran teknologi RDF atau kompos, melainkan juga soal membangun ruang solidaritas lintas batas bagi perempuan pekerja sampah.

Bentuk konkrit Feminist Sisterhood Diplomacy dapat dimulai dengan pertukaran pengalaman. Perempuan KSM dan Kudumbashree dapat saling berbagi strategi, baik melalui kunjungan langsung maupun tatap maya, tentang bagaimana menghadapi tantangan minimnya upah, kurangnya proteksi, dan stigma sosial. Diez dan Bossio (2024) menunjukkan bahwa solidaritas perempuan di ruang daring dapat menjadi sarana efektif memperkuat identitas kolektif, dan model ini bisa diadopsi dalam skala internasional melalui kerjasama antar kota.

Selain itu, pelatihan bersama dapat dilakukan dengan fokus pada penguatan kapasitas organisasi, manajemen komunitas, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Enrile dan Levid (2019) melalui studi mereka tentang jaringan transnasional sisterhood menegaskan bahwa solidaritas lintas negara dapat memperkuat kapasitas organisasi perempuan untuk mengelola tantangan struktural. Pelatihan ini dapat memastikan bahwa perempuan tidak hanya berperan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

di ranah operasional, tetapi juga mampu mengelola kelompok secara profesional.

Kerjasama ini juga dapat diperluas ke advokasi kebijakan lintas kota. Perempuan dari Banyumas dan Alappuzha dapat membentuk forum bersama untuk menyuarakan isu-isu seperti standar upah minimum, perlindungan kesehatan, dan pengakuan formal. Natividad (2011) menunjukkan bahwa solidaritas feminis transnasional dapat membuka ruang baru untuk menghubungkan pengalaman perempuan termarginalisasi dengan agenda kebijakan global. Advokasi semacam ini memungkinkan diplomasi kota bergerak melampaui simbolisme menjadi forum substantif yang memperjuangkan keadilan gender.

Selanjutnya, perempuan KSM dan Kudumbashree dapat melakukan ko-produksi materi edukasi masyarakat. Mereka dapat bersama-sama membuat modul pemilahan sampah, video kampanye, atau panduan kesehatan kerja. Produksi bersama ini tidak hanya berfungsi meningkatkan literasi lingkungan, tetapi juga menegaskan peran perempuan sebagai produsen pengetahuan. Zhang (2020) menunjukkan bagaimana perempuan pekerja migran dapat mengartikulasikan narasi alternatif tentang keadilan sosial dan lingkungan melalui pengalaman mereka sendiri. Pola serupa dapat diaplikasikan dalam konteks Banyumas dan Alappuzha.

Akhirnya, terbentuknya jaringan komunitas perempuan lintas kota dapat menjadi basis diplomasi akar rumput. Choi et al. (2023) menekankan bahwa solidaritas feminis memiliki fungsi penting dalam menghubungkan pengalaman perempuan di berbagai konteks untuk menghadapi krisis global. Dengan menjadikan jaringan ini sebagai bagian integral dari sister city, Banyumas dan Alappuzha dapat menciptakan model diplomasi kota yang lebih adil, substantif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Banyumas dan Alappuzha menunjukkan bahwa komunitas perempuan merupakan aktor utama yang menggerakkan keberlanjutan sistem desentralisasi. Peran ini bersifat vital karena menentukan keberhasilan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah di tingkat komunitas. Namun demikian, kontribusi perempuan masih berlangsung dalam posisi kerja yang rentan, ditandai dengan upah rendah, proteksi sosial yang minim, serta keterbatasan dalam akses pengambilan keputusan.

Dalam konteks diplomasi kota, kerangka sister city perlu diperluas ke arah sisterhood diplomacy berbasis solidaritas perempuan. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya jaringan lintas kota yang menempatkan komunitas perempuan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Hal ini penting untuk memperkuat dimensi keadilan gender dalam keberlanjutan pengelolaan sampah. Pengakuan terhadap kerja perempuan sebagai layanan esensial, bukan sebagai kontribusi sukarela, menjadi syarat mutlak agar inovasi pengelolaan sampah di Global South dapat berkelanjutan. Kerja sama antar-kota yang berbasis komunitas perempuan, baik melalui pertukaran pengalaman, pelatihan bersama, maupun advokasi kebijakan, diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada perlindungan sosial, pengakuan politik, dan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan dana riset untuk penelitian ini melalui Skema Riset Pengembangan Kompetensi (RPK) dengan nomor kontrak 14.440/UN23.34/PT.01/V/2025. Terima kasih juga kepada Rakendu S. peneliti Ashank Desai Centre for Policy Studies, IIT Bombay, Elita Rosiyani dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan KSM Desa Rempoah atas bantuannya dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acuto, M. 2013. *Global Cities, Governance and Diplomacy: The Urban Link*. Routledge.
- Bank Dunia. 2018. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank.
- Boris, E., & Vosko, L. F. 2020. Beyond "Legal Equality" vs. "Difference" Feminism: Leah F. Vosko Interviews Eileen Boris on Women and the ILO. *Labor* 17(4): 106–112.
- Choi, S., de Souza, N. M. F., Lind, A., Parashar, S., Prügl, E., & Zalewski, M. 2023. What do we need feminist solidarity for? *International Feminist Journal of Politics* 25(4): 565–569.
- Choudhury, K. (2017, May 1). How people power forced a waste-management revolution in Kerala. *The Caravan*. <https://caravanmagazine.in/reportage/people-power-waste-management-revolution-kerala>
- Diez, I., & Bossio, J. 2024. Women's solidarity as feminism in action: The concept of sisterhood (sororidad) in #LasRespondonas, a Facebook group in Peru. *Information Technology for Development* 30(2): 229–245.
- Enrile, A. V., & Levid, J. 2019. GAB[riela] NET[work]: A Case Study of Transnational Sisterhood and Organizing. *Amerasia Journal* 35(1): 92–107.
- Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. 2013. Solid waste management challenges for cities in developing countries. *Waste Management* 33(1): 220–232.
- Hidayat, A., & Pusparini, E. 2022. City diplomacy of Jakarta government in the environmental sector in 2017–2021. *Journal of International Relations and Diplomacy* 10(1): 12–24.
- Mohan, S., Nithya, R., & Anitha, V. 2020. Decentralised waste management: A case study of Alappuzha, Kerala. *Journal of Environmental Management* 268: 110652.
- Natividad, B. R. 2011. *Caring Work: Opening a Space of Possibility for Exploring Transnational Feminist Solidarity Between Privileged and Marginalized Women*. Doctoral dissertation, University of Denver.
- Purwendah, E., & Wahyono, H. 2022. Supporting factors of the success of waste management replication in Banyumas Regency, Central Java, Indonesia. *E3S Web of Conferences* 325: 02003.
- Rakendu S., 2025. "Wawancara Personal dengan peneliti Ashank Desai Centre for Policy Studies, IIT Bombay", 13 Juni



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

- Ridlo, M. (2018, May 27). Purwokerto Darurat sampah usai TPA Kaliori diblokade warga. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/3540531/purwokerto-darurat-sampah-usai-tpa-kaliori-diblokade-warga>
- Rosiyani, E., 2025. "Wawancara Personal dengan Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas", Banyumas, 13 August
- Saravana, S. C., & Pushpa, K. S. 2017. Sustainability of Women's Empowerment Through Kudumbashree. *International Journal of Research-Granthaalayah* 5(12): 155–163.
- Sembiring, E., & Nitivattananon, V. 2010. Sustainable Solid Waste Management Towards an Inclusive Society: Integrating the Informal Sector. *Resources, Conservation and Recycling* 54(11): 802–809.
- Sholihah, A. N., & Rahardjo, B. 2021. Shifting waste policy issues at the local level: A case study in Banyumas. *Journal of Governance and Public Policy* 8(1): 12–25.
- Suryani, D., Latifah, S., & Agustina, N. 2021. Replication of community-based waste management in Banyumas Regency: Opportunities and challenges. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development* 4(2): 143–156.
- Tnn. (2025, April 20). Kudumbashree empowers over three lakh women through micro enterprises in Kerala. *The Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/kudumbashree-empowers-over-three-lakh-women-through-micro-enterprises-in-kerala/articleshow/120460072.cms>
- Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. 2012. Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International* 30(4): 797–808.
- Yandria, A., Budia, R., & Putri, D. 2023. Gendered Participation in Community-Based Solid Waste Management: A Study of Women's Roles in Indonesian Urban Villages. *Asian Journal of Environment and Development* 15(2): 89–105.
- Zhang, Y. 2020. An Intersectional Analysis of Social and Environmental Injustice Experienced by Migrant Women Workers in China: The Case of Guiyu. Doctoral dissertation, Australian Catholic University.